

**DIMENSI PENGUKURAN AKUNTANSI PERTANGGUNG
JAWABAN SOSIAL DALAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DAN SUSTAINABILITY REPORTING**

Budianto Tedjasuksmana

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

ABSTRACT

The topic of social responsibilities reporting usually relates with the responsible for firms to their direct owners (shareholders) alone, or do they owe a duty to the wider community in which they operate. A firm should voluntarily disclose information publicly about its social and environmental performance that implies the managers are acknowledging that they are accountable to abroad group of stakeholders in relation not to only their financial performance, but also their social and environmental performance. Those environmental aspects should be described in a lot of progress in their social publicly responsibilities reporting, hoping that all shareholders know completely the whole position and financial performance, risks, business prospects and corporate sustainability. The accountability for these report disclose all aspects that shows measurement of company's social performance as a key success factor for social performance measurement. Socio Economic Enviromental Accounting is wide-spread concept for firms wishing to realize broader societal and environmental objectives in addition to increasing shareholdes value.

Keywords: *social performance measurement, Socio Economic Enviromental Accounting*

PENDAHULUAN

Suatu industri pada umumnya memiliki *credo* untuk mengejar pertumbuhan laba yang maksimal, jadi perusahaan pada umumnya akan menggunakan sumber daya dan energi yang dimilikinya dalam berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan *profitnya*. Akan tetapi perlu ada tambahan penekanan bahwa hal tersebut seyogyanya sejauh dalam batas-batas aturan main, dan melakukan secara terbuka serta bersaing secara bebas tanpa tipu muslihat dan curang. Penggunaan

sumber daya dan energi yang dimiliki untuk memnuhi tanggung jawab sosial hanya akan membebani pemegang saham, karyawan, dan para pelanggan. Friedman dalam bukunya menyatakan bahwa tugas utama bisnis adalah menghasilkan barang atau jasa secara efisien yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan mutu yang baik sehingga laku di pasar. Peningkatan profit yang terjadi akan mendorong peningkatan akumulasi modal perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat dibukanya perluasan perusahaan dan hal ini tentu saja akan memberikan lapangan kerja baru kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Suatu bentuk kewajiban perusahaan terhadap pemerintah adalah membayar pajak. Secara singkat dunia bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap bisnis itu sendiri.

Semenjak Sekjen PBB Kofi Annan pada tahun 2005 mengkampanyekan etika korporasi dalam pertemuan *Global Impact*, hal ini disambut oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan pasal 74 Undang Undang perseroan Terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pertimbangan keluarnya peraturan tersebut dapat dipahami untuk meminimalisasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang telah dilakukan korporasi terhadap kehidupan sosial. Korporasi pada umumnya kurang memperhatikan masalah lingkungan karena biaya dan akibat dari pengelolaan lingkungan tidak berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup korporasi. Dengan demikian sekarang tampaknya suatu tanggung jawab baru melekat pada semua kegiatan usaha, tanpa memandang ukurannya. Tanggung jawab sosial korporat itu pada umumnya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan *Community Relations*, dalam bentuk beasiswa, bantuan pemberian buku, merehabilitasi lingkungan hidup, atau membantu usaha kerajinan rakyat.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Sankat dan Clement

(2002) mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas local, dan komunitas luas.

Fokus penekanan pembahasan ini adalah bagaimana upaya melakukan pengukuran kinerja sosial perusahaan dan lingkungan sehubungan dengan laporan CSR yang ada. Pengukuran atas item-item yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan dengan baik mengingat adanya biaya kehidupan sosial serta biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku bisnis, yang secara tidak disadari ditanggung oleh masyarakat .

THE PERSPECTIVES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SFAC no 1 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya. Deegan (2004: 292) mengungkapkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan didukung oleh *legitimacy theory* dan *stakeholder theory*. *Legitimacy theory* menjelaskan bahwa organisasi secara kontinuakan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan. *Stakeholder theory* berimplikasi terhadap kebijakan manajemen dalam mengelola harapan *stakeholder*. Jadi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Perspektif filosofis CSR dilandasi kedermawanan, jadi tiada unsur yang lain, sedangkan yang lain adalah meningkatkan citra perusahaan. Bowen seperti yang dikutip oleh Ardianto dan Machudz (2011:47) “ ... *it refer to obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society*’ . Pelaku

bisnis seyogyanya mengenal kewajiban serta memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai masyarakat (Hadi, 2011: 50). Program pelaksanaan dapat berupa pemberian donasi tunai, pemberian hibah, pemberian beasiswa, donasi produk dari bahan baku daur ulang, donasi pelayanan atas informasi, pemberian ketrampilan teknis, pemberian penggunaan fasilitas dan saluran distribusi, juga pemberian penggunaan peralatan (Kooler dan Lee, 2005: 145-146).

Perspektif komunikasi dalam CSR terkait dengan suatu proses antara pengirim dan pendengar berupa tanggapan. Kotler dalam bukunya memuat bahwa survei perusahaan kosmetik *body shop* lebih dihargai karena kepeduliannya tidak menggunakan hewan sebagai *cosmetics test*. Jadi perspektif komunikasi menyangkut juga perspektif citra, reputasi. Hal ini kadang dapat dilihat pada tayangan televisi. Tentu hal ini perlu disikapi dengan seksama apakah wacana *advertorial* CSR tersebut sudah mencerminkan hakekat CSR yang benar.

Pada perspektif psikologis pelaksanaan CSR menyangkut kesadaran untuk melakukan kebebasan yang penuh dari tekanan apapun untuk melakukan CSR secara benar yang tentu hal ini tidak bisa terlepas dari pemahaman yang menyeluruh tentang CSR.

Pada perspektif sosiologis CSR akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran sebagai kekuatan agen pembangunan. CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-holdernya*, terutama komunitas di sekitar wilayah operasinya, dengan atau tanpa hukum suatu korporat harus menjunjung tinggi prinsip moral dan etis. Korporat mempunyai komitmen dalam mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya (Achda, 2006).

Ardianto dan Machudz (2011: 97) menegaskan adalah penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki budaya yang bertanggung jawab. *Corporate citizenship* didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap karyawan, pemegang saham, konsumen, pemasok, dan komunitas *stockholder* dimana perusahaan menjalankan bisnis dan melayani pasar.

Corporate citizenship melambangkan paduan antara keinginan perusahaan dan keinginan publik. Dengan demikian tampak jelas bahwa budaya perusahaan memiliki korelasi dengan CSR.

IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT

Pada umumnya semua perusahaan memiliki suatu sikap dan pandangan yang filantropis (kedermaan), yaitu sikap altruisme, suatu sikap mementingkan kepentingan orang lain dan suatu kedermaan yang timbul dari kepentingan pribadi. Ite dan Tesoriero dalam Ardianto dan Machfudz menyatakan bahwa *Community Development* merupakan salah satu bentuk aktualisasi CSR, yang bertujuan untuk membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elit profesional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Di Indonesia lahirnya program dalam Pengembangan Masyarakat didorong oleh kesenjangan sosial-ekonomi, yang mana diharapkan dapat menumbuhkan pemerataan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Praktek tanggung jawab sosial dipercaya sebagai landasan fundamental bagi pertumbuhan berkelanjutan, bukan hanya bagi perusahaan, akan tetapi juga bagi *stakeholder* secara keseluruhan.

Kegiatan CSR Pertamina dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis 42%, kampanye anti narkoba 35%, pencegahan penyakit menular 20%, penyediaan sarana kesehatan 16%, pemberian tambahan makanan gizi 12% serta promosi Keluarga Berencana 3% (Cahyati, 2008:167).

PT Toyota Astra Motor dan PT Astra Honda Motor memberikan beasiswa sejumlah Rp 4 – 5 miliar setahun (Ardianto dan Machudz, 2011:164). Peranan media cetak, siaran televisi merupakan contoh bagian strategi korporat dalam membentuk citra yang ada dalam publik.

Suatu hal yang bertolak belakang dengan contoh di atas bahwa terdapat juga berita bahwa untuk meningkatkan persaingan nilai upah ditekan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan tidak ada jaminan kelanggengan bekerja

bagi buruh harian lepas (Kompas , 2 Juli 2010), Masalah perusakan lingkungan juga dimuat dalam Kompas (25 Juni 2010), eksploitasi batubara yang kurang memperhatikan daya dukung kawasan terus mengancam kelestarian lingkungan. Dari uraian di atas tampak bahwa korporasi sepintas memiliki perhatian terhadap pertanggung jawaban sosial pada masyarakat sekitar korporasi, akan tetapi perlu juga diamati sampai sejauh mana anggaran CSR yang disediakan , dan sejauh mana realisasinya, dengan demikian perlu suatu audit dan pengawasan yang baik dari pihak independen, karena biaya lingkungan akibat kegiatan ekonomi juga sulit pengukurannya.

BIAYA LINGKUNGAN

Menurut pandangan *concession theory*, pada dasarnya perusahaan eksis karena konsesi atau hak istimewa yang diberikan oleh negara (Deegan ,193). Dampaknya dari pengertian ini adalah kepentingan individu berada dibawah kepentingan publik. Melihat hal ini tidaklah berlebihan apabila pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mewujudkan kontrak sosial dan lingkungannya, hal ini selaras dengan konsep CSR, yang mana jika ditelusuri mengandung tiga aspek yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Dengan demikian perlu diketahui bahwa dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan belum banyak diungkap bahkan mendapat perhatian. Biaya lingkungan mencakup rentang biaya dari yang mudah diukur sampai yang sulit dilakukan pengukurannya. *Global Environmental Management Initiative* memberikan panduan klasifikasi dalam biaya lingkungan yaitu biaya konvensional, biaya tersembunyi (*hidden cost*), biaya tergantung (*contingent cost*), biaya pencitraan perusahaan dan relasi (*image and relationship cost*) serta biaya sosial yang pada umumnya tidaklah mudah diukur. Berikut adalah contoh polusi yang ditimbulkan oleh Ontario Hydro.

Tabel 1
Pengaruh Eksternal Dari Fossil Ontario Hydro

| Receptor | Pollutant of concern | Unit value | Monetised \$M 1992 | Impact kW |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|-----------|
| Mortality (Statistical deaths) | SO ₂ ,SO ₄ ,O ₃ ,NO ₃ | \$ 4,725,600 | 21.40 | 0.088 |
| Morbidity (Admissions) | SO ₂ ,SO ₄ ,O ₃ ,NO ₃ , TSP | \$ 44,700 | 50.83 | 0.210 |
| Cancer cases | Trace metals | \$ 408,397 | 9.53 | 0.039 |
| Crops | O ₃ | N/A | 8.32 | 0.034 |
| Building materials | SO ₂ | N/A | 5.71 | 0.024 |
| Total | | | 95.79 | 0.395 |

Sumber : Deegan, (2004:339)

Gema CSR diawali Howard R Bowen yang mengenalkan *Social Responsibilities of the Business* yang berpandangan bahwa suatu korporasi memiliki adanya tanggung jawab sosial komunitas, yang mencakup kepedulian dan harapan konsumen, masyarakat, otoritas publik, dan investor, termasuk kepedulian terhadap kerusakan lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya dan alam pada umumnya. Manusia harus memelihara “rumah” tersebut agar merupakan tempat tinggal yang menyediakan situasi kondusif bagi hidup manusia itu sendiri dan bagi semua makhluk yang hidup bersama dengan nya. Pada tabel 1 di atas tampak bahwa polusi bahan kimia yang ditimbulkan dan penyakit yang diakibatkannya , beserta nilai kerugian dalam dollar yang ditimbulkannya.

Kasus PT. Freeport Indonesia juga merupakan contoh nyata karena dianggap memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, akan tetapi belum pernah diadakan pengkajian mendalam efek negatif perusakan lingkungan yang diakibatkannya. Biaya kerusakan lingkungan mencakup berbagai aspek termasuk kesehatan masyarakat, sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit yang

diderita masyarakat tidak satu satunya disebabkan oleh akibat kegiatan ekonomi korporat. Pada Tabel 2 dapat pula dilihat adanya satwa yang dilindungi tetapi tetap menjadi pertimbangan ekonomis bagi korporasi, sehingga satwa tersebut terancam punah.

Jadi CSR secara implisit berbicara etika ekologis. Dalam pelaksanaannya perlu direnungkan sampai sejauh mana mentalitas para warga negara peduli, bahkan kadang dapat ditemui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak jarang merupakan faktor yang menentukan pilihan politis.

Pada Tabel 3 dapat dilihat pula adanya produk industri yang semakin banyak di kota besar ditengarai dapat memberikan kontribusi dalam menimbulkan penyakit bagi manusia, seperti yang terpapar dalam Tabel 4. Jadi di sini bisa direnungkan berapa biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi.

Tabel 2
Satwa Asli Australia yang Dilindungi

| Species | Status | Number | | Net Market Value | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|
| | | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 |
| Southern hairy nosed wombat | Threatened | 100 | 100 | 125,000 | 125,000 |
| Rufous Bettong | Threatened | 97 | 86 | 121,250 | 107,500 |
| Long nosed Potoroo | Threatened | 90 | 85 | 112.500 | 87.500 |
| Southern Brown Bandicoot | Threatened | 85 | 70 | 106.250 | 45,000 |
| Tammar Wallaby | Threatened | 42 | 36 | 52,500 | 22,500 |
| Eastern Quoll | Threatened | 36 | 18 | 45,000 | 87,500 |
| Cream Striped Necked Pademelon | Rare | 45 | 35 | 112,500 | 300,000 |
| Yellow-footed Rock-Wallaby | Rare | 120 | 120 | 300,000 | 1,485,000 |
| Woylie | Endangered | 341 | 297 | 1,705,000 | 305,000 |
| Numbat | Endangered | 130 | 61 | 650,000 | 90,000 |
| Bilby | Endangered | 38 | 18 | 190,000 | - |
| Stick Nest Rat | Endangered | 33 | - | 165,000 | - |
| Bridled Nailtail Wallaby | Endangered | 20 | - | 100,000 | 35,000 |
| Boodie | Endangered | 12 | 7 | 60,000 | 2,796,250 |
| Total | | 1,189 | 933 | 3,845,000 | |

Sumber : Deegan, (2004:347)

Dengan pemaparan data-data di atas seyogyanya masyarakat mempunyai penyediaan informasi pengelolaan lingkungan. Berikut dipaparkan adanya kerusakan lingkungan yang tampaknya belum disadari, dapat dilihat pada tabel berikut. Adanya nilai ekonomis yang tinggi pada satwa yang dilindungi tentu akan menjadi pertimbangan korporasi dalam memburunya.

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2010

| Tahun | Mobil Penumpang | Bis | Truk | Sepeda Motor | Jumlah |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 1987 | 1 170 103 | 303 378 | 953 694 | 5 554 305 | 7 981 480 |
| 1988 | 1 073 106 | 385 731 | 892 651 | 5 419 531 | 7 771 019 |
| 1989 | 1 182 253 | 434 903 | 952 391 | 5 722 291 | 8 291 838 |
| 1990 | 1 313 210 | 468 550 | 1 024 296 | 6 082 966 | 8 889 022 |
| 1991 | 1 494 607 | 504 720 | 1 087 940 | 6 494 871 | 9 582 138 |
| 1992 | 1 590 750 | 539 943 | 1 126 262 | 6 941 000 | 10 197 955 |
| 1993 | 1 700 454 | 568 490 | 1 160 539 | 7 355 114 | 10 784 597 |
| 1994 | 1 890 340 | 651 608 | 1 251 986 | 8 134 903 | 11 928 837 |
| 1995 | 2 107 299 | 688 525 | 1 336 177 | 9 076 831 | 13 208 832 |
| 1996 | 2 409 088 | 595 419 | 1 434 783 | 10 090 805 | 14 530 095 |
| 1997 | 2 639 523 | 611 402 | 1 548 397 | 11 735 797 | 16 535 119 |
| 1998 | 2 769 375 | 626 680 | 1 586 721 | 12 628 991 | 17 611 767 |
| 1999 ¹⁾ | 2 897 803 | 644 667 | 1 628 531 | 13 053 148 | 18 224 149 |
| 2000 | 3 038 913 | 666 280 | 1 707 134 | 13 563 017 | 18 975 344 |
| 2001 | 3 189 319 | 680 550 | 1 777 293 | 15 275 073 | 20 922 235 |
| 2002 | 3 403 433 | 714 222 | 1 865 398 | 17 002 130 | 22 985 183 |
| 2003 | 3 792 510 | 798 079 | 2 047 022 | 19 976 376 | 26 613 987 |
| 2004 | 4 231 901 | 933 251 | 2 315 781 | 23 061 021 | 30 541 954 |
| 2005 | 5 076 230 | 1 110 255 | 2 875 116 | 28 561 831 | 37 623 432 |
| 2006 | 6 035 291 | 1 350 047 | 3 398 956 | 32 528 758 | 43 313 052 |
| 2007 | 6 877 229 | 1 736 087 | 4 234 236 | 41 955 128 | 54 802 680 |
| 2008 | 7 489 852 | 2 059 187 | 4 452 343 | 47 683 681 | 61 685 063 |
| 2009 | 7 910 407 | 2 160 973 | 4 498 171 | 52 767 093 | 67 336 644 |
| 2010 | 8 891 041 | 2 250 109 | 4 687 789 | 61 078 188 | 76 907 127 |

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

¹⁾ sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Perkembangan ekonomi dari aktivitas ekonomi dapat dilihat dari perkembangan akan permintaan produk industri misalnya kendaraan bermotor dan angkutan lainnya. Apabila diamati dengan baik dan direnungkan maka akan tampak ada korelasi antara tercemarnya lingkungan yang diakibatkan adanya aktivitas ekonomi, dan bahkan tentunya tidak dapat dipungkiri akan berimbas pada tingkat kesehatan pada masyarakat. Adanya probabilitas keterkaitan hal tersebut di atas dapat dilihat dari data pasien baik yang dirawat inap maupun yang dirawat jalan di rumah sakit di Indonesia

Tabel 4
Data Penyakit Pasien 2010 di Rumah Sakit di Indonesia

| No | Daftar Tabulasi Dasar (DTD) | Kasus | | Jumlah Kasus Baru | Jumlah Kunjungan |
|----|--|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1 | Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya | 147.410 | 143.946 | 291.356 | 433.354 |
| 2 | Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badan Multipel | 77.337 | 49.739 | 127.076 | 168.768 |
| 3 | Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya | 48.576 | 73.500 | 122.076 | 192.414 |
| 4 | Gangguan refraksi dan akomodasi | 42.349 | 69.164 | 111.513 | 143.404 |
| 5 | Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 53.389 | 51.890 | 105.279 | 141.556 |
| 6 | Dispepsia | 34.981 | 53.618 | 88.599 | 163.428 |
| 7 | Penyakit pulpa dan periapikal | 39.427 | 46.994 | 86.421 | 163.211 |
| 8 | Hipertensi esensial (primer) | 35.462 | 45.153 | 80.615 | 277.846 |
| 9 | Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva | 30.250 | 37.776 | 68.026 | 87.513 |
| 10 | Penyakit telinga dan prosesus mastoid | 30.583 | 30.055 | 61.438 | 99.663 |

Sumber: Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

Tabel 5
Data Pasien Rawat Jalan 2010 di Rumah Sakit di Indonesia

| No | Daftar Tabulasi Dasar (DTD) | Kasus | | Total Kasus | Meninggal | CFR (%) |
|----|--|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | | |
| 1 | Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 71.161 | 60.535 | 143.696 | 1.747 | 1,22 |
| 2 | Demam Berdarah Dengue (DBD) | 60.705 | 60.629 | 121.334 | 893 | 0,74 |
| 3 | Demam Titoid dan Paratitoid | 39.262 | 41.588 | 80.850 | 1.013 | 1,25 |
| 4 | Demam yang penyebabnya tidak diketahui | 24.957 | 24.243 | 49.200 | 462 | 0,94 |
| 5 | Dispepsia | 18.807 | 28.497 | 47.304 | 520 | 1,1 |
| 6 | Hipertensi esensial (primer) | 15.533 | 21.144 | 36.677 | 935 | 2,55 |
| 7 | Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya | 19.115 | 15.933 | 36.048 | 162 | 0,45 |
| 8 | Pneumonia | 19.170 | 15.777 | 35.647 | 2.365 | 6,63 |
| 9 | Penyakit apendiks | 13.920 | 15.783 | 30.703 | 234 | 0,76 |
| 10 | Gastritis dan duodenitis | 12.758 | 17.396 | 30.154 | 235 | 0,78 |

Sumber: Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

Pada keseluruhan tabel-tabel di atas tampak secara tidak langsung berbicara biaya kehidupan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya polusi, biaya kerusakan lingkungan, biaya kepunahan hewan langka, dan biaya kesehatan masyarakat.

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL SEBAGAI AKUNTABILITAS KORPORASI DALAM EVALUASI CSR

Melihat paparan di atas bahwa konsep CSR dalam pelaksanaannya perlu dipastikan berada dalam jalur yang benar, dengan demikian perlu suatu evaluasi. Persoalan lingkungan cukup signifikan menarik perhatian internasional, sehingga melahirkan kesepakatan-kesepakatan antar negara dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan lingkungan yang terjadi pada tempat masing-masing.

Epson *Industry* Indonesia menerapkan kebijakan *Green Purchase* yang memaksa para pemasoknya untuk memiliki sistem manajemen lingkungan yang

baik. Astra Internasional mengembangkan *Astra Green Company* untuk memastikan anak-anak perusahaannya memiliki sistem manajemen lingkungan yang efektif. Menyikapi kondisi seperti yang diuraikan di atas, maka untuk memenuhi tuntutan *stake-holder* dan sekaligus sebagai bagian pertanggung jawaban sosial, korporat memerlukan sistem pengelolaan lingkungan, Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan mengenai lingkungan dan juga sebagai panduan bagi organisasi dalam mengelola aspek lingkungannya.

Bentuk-bentuk konkrit dari pelaksanaan CSR misalnya bantuan stimulan modal untuk koperasi dan unit usaha kecil, bantuan korban bencana alam, maupun dalam wilayah direktur korporat berupa bentuk pemberian bonus, yang saat ini dapat dikatakan sebagai *key success factors*.

Pendekatan untuk menciptakan lingkungan melalui manajemen lingkungan sebagai sistem *Environment Management Standard* atau ISO14001, merupakan sistem manajemen lingkungan yang memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan performansi lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan terhadap konsumen serta untuk memenuhi persyaratan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah (Hilman dan Kristiningrum, 2008).

Laporan eko-efisiensi dan laporan lingkungan juga merupakan dua perangkat yang perlu dipertimbangkan pula sebagai komponen laporan pertanggung jawaban lingkungan.

Audit lingkungan atas implementasi ISO 14001 adalah bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan bidangnya. Disamping itu pula audit sistem manajemen perlu dilakukan untuk menjawab apakah organisasi telah mempunyai proses dan prosedur yang diperlukan dan telah dilakukannya. ISO 14000 merupakan suatu sertifikasi yang perlu diwajibkan sebagai salah satu upaya menciptakan ramah lingkungan atas produk yang dihasilkannya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa aspek etika lingkungan hidup perlu ditumbuhkan sebagai rasa hormat terhadap alam, suatu sikap dasar utama

kesadaran ekologis yang mutlak dimiliki. “Tidak hanya manusia, tetapi juga hidup binatang, dan tumbuh-tumbuhan serta alam tak bernyawa patut dihargai, dihormati dan dilindungi.” (Peschke, 2003:294). Jadi ada alasan moral yang dituntut bagi suatu korporat dan tolok ukurnya adalah rencananya harus dirancang bagi manusia dan seluruh ciptaan.

David (2008) menulis bahwa aktivitas suatu organisasi berdampak pada lingkungan eksternal. Jadi diperlukan kebijakan akuntansi yang melaporkan dampak organisasi tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntansi sosial dan audit sosial juga merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi pelaksanaan CSR. Akuntansi sosial adalah suatu pendekatan yang menjelaskan secara akuntansi bahwa perolehan informasi dari suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap masyarakat baik ke dalam maupun keluar, audit sosial merupakan proses pengamatan kinerja organisasi dalam relasinya terhadap harapan serta kebutuhan masyarakat .

Akuntansi merupakan wacana yang dipengaruhi dan memengaruhi lingkungannya. Timbulnya gerakan peduli lingkungan, akuntansi menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, yang kemudian melahirkan akuntansi lingkungan. Sejak memahami akuntansi sebagai bagian dari fungsi *service* baik sosial, budaya, ekonomi bahkan politik , maka banyak faktor mempengaruhi akuntansi itu sendiri. Belkoui dan Ronald (1991) menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan lingkungan sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi akuntansi. Konsekuensi dari wacana akuntansi sosial dan lingkungan ini pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Enviromental Accounting* Wiedman dan Manfred (2006, page 2) menyatakan bahwa pelaporan akuntansi ke publik tidak saja mencakup kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya.

Triple-bottom-line (TBL) accounting is wide-spread concept for firms wishing to realize broader societal and environmental objectives in addition to increasing shareholders value. TBL accounts routinely cover social, economic and

environmental indicators and enable decisions-makers to quantify trade-offs between different facets of sustainability.

Akuntansi lingkungan kerap kali dikelompokkan dalam wacana akuntansi sosial. Hal ini terjadi karena kedua diskursus tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menginternalisasi eksternalitas (lingkungan sosial dan lingkungan ekologis) baik positif maupun negatif ke dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi tidak hanya mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya, tetapi juga mengelola permasalahan lingkungan dan penyebab kerusakannya. Pada akuntansi lingkungan juga akan menemui kesulitan dalam mengukur nilai *cost* dan *benefit* eksternalitas yang muncul dari proses industry. Bukan hal yang mudah mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amoniak, kebocoran tabung nuklir seperti di Fukushima, Jepang serta eksternalitas lainnya.

Dengan melihat paparan masalah di atas, Hadi (2011) memberikan contoh ranah pengukuran kinerja sosial dengan berbagai unsur *stakeholder*. Dengan mengacu pada pemikiran yang menekankan aspek pengungkapan dari bidang pengukuran TBL seperti yang dikemukakan oleh Wiedman dan Manfred tentang *Socio Economic Enviromental Accounting*, maka dalam *annual report* seyogyanya memuat bentuk pengeluaran tanggung jawab sosial berupa kegiatan riil, di mana dapat diklasifikasikan dalam bentuk tanggung jawab langsung dan tak langsung terhadap *stakeholder*. dapat dicontohkan dalam hal ini misalnya dalam aspek komponen lingkungan, aktivitas riil CSR dapat berupa investasi untuk pengolahan limbah, rehabilitasi dan reklamasi lingkungan, sedangkan aspek *community*, aktivitas CSR dapat berupa bantuan kesehatan, bantuan air bersih, pada aspek produk CSR dapat berupa adanya riset dan pengembangan, memiliki prosedur produksi dan mengacu pada standar kualitas, sistem pengendalian dan penjaminan mutu. Berikut di bawah ini disajikan rangkuman beberapa contoh hal yang menjadi wilayah tanggung jawab korporasi sehubungan dengan kriteria CSR beserta indikatornya.

Tabel 6.1.
Bidang Pengukuran CSR

| <i>Stakeholder</i> | Ranah Ukuran Kinerja Sosial Perubahan | | |
|---------------------|---|--|---|
| | <i>Legal</i> | <i>Economic</i> | <i>Ethic</i> |
| <i>Community</i> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim <i>Community</i> akibat pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat. ■ Tingkat keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim <i>Community</i> akibat kurang keberpihakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim dari masyarakat akibat pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan ■ Tingkat keberpihakan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis terkait masyarakat sekitar, dan sejenisnya. |
| <i>Enviromental</i> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim <i>stakeholder</i> akibat pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap berbagai peraturan yang berlaku terkait dengan lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim <i>stakeholder</i>, akibat eksploitasi sumber daya ekonomi yang menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi, dan sejenisnya. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim <i>stakeholder</i>, akibat pelanggaran etika bisnis sehingga merusak lingkungan, eksploitasi tak seimbang, polusi, dan sejenisnya. |
| <i>Consumers</i> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim konsumen akibat pelanggaran aturan terkait dengan kualitas dan kesehatan produk, pelayanan, dan sejenisnya. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim konsumen akibat kurang equal dalam memberi kemanfaatan antara barang yang dibeli dengan biaya yang dikorbankan, dan sejenisnya. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim konsumen akibat perusahaan tidak mematuhi etika bisnis yang sehat, tidak jujur, tidak equqal dalam informasi, melanggar kode etik dan sejenisnya. |
| <i>Employee</i> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim dari tenaga kerja, akibat perusahaan tidak konsisten dan bersikap adil, serta melanggar peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim dari tenaga kerja, akibat perusahaan kurang memberi jaminan kualitas kesehatan, kesejahteraan, jaminan masa depan, promosi, renumerasi, atmosfir kerja kondusif, dan sejenisnya. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tingkat klaim dari <i>employee</i>, akibat pelanggaran etika bisnis, seperti: diskriminasi, kesewenangan, pelanggaran hak dan kewajiban karyawan, dan sejenisnya. |

Tabel 6.1
Bidang Pengukuran CSR (lanjutan)

| Wilayah Tanggungjawab | Indikator |
|----------------------------------|---|
| <i>Community</i> | Bantuan perbaikan jalan , penyediaan air bersih sekitar perusahaan |
| | Bantuan peningkatan kesejahteraan & ekonomi masyarakat sekitar . |
| | Bantuan stimulan modal untuk UKM dan Koperasi |
| | Bantuan untuk Yatim Piatu dan Panti Jompo, anak jalanan |
| <i>Enviromental</i> | Memiliki program investasi untuk pengelolaan dan pengolahan limbah |
| | Melakukan riset berkelanjutan untuk pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan |
| | Berusaha melakukan kegiatan preventif dan represif dalam pencegahan pencemaran dalam rangka proses produksi |
| <i>Energy</i> | Program penghematan energi dalam proses produksi |
| | Membantu sumber energi alternatif secara mandiri ramah lingkungan |
| | Ikut menyelenggarakan konvensi penghematan energi |
| | Mengembangkan produk <i>bio-diesel</i> untuk mendukung program energi ramah lingkungan |
| <i>Employee</i> | Memiliki program pemberian insentif, imbalan pasca kerja dan pension |
| | Jaminan kesehatan karyawan |
| | Mendukung efektifnya serikat pekerja |
| | Memiliki program Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (LK3) |
| | Membangun hubungan baik dan dekat terhadap media massa sebagai media <i>social control</i> |
| <i>Supplier</i> | Memiliki standard an kriteria berikut implementasinya dalam penentuan <i>supplier</i> |
| | Mengedepankan etikas bisnis terkait dengan <i>supplier</i> |
| | Memiliki kontrak kerja jelas, dan berusaha melakukan kontrak kerja dengan <i>supplier</i> |
| | Menjaga etika bisnis dengan <i>supplier</i> |
| | Menjaga persaingan secara sehat dan <i>fair</i> |
| <i>Marketforce</i> | Keterbukaan dalam penyampaian produk |
| | Menjaga etika bisnis dengan <i>marketforce</i> |
| <i>Shareholder</i> | Menjalin komunikasi dengan para investor dan calon investor |
| | Menjalin etika bisnis terkait dengan <i>shareholder</i> |

Dalam beberapa pengamatan literatur yang telah dilakukan , beberapa pertanyaan yang sering timbul pada umumnya mendasari tentang perhatian terhadap lingkungan hidup dan tentunya hal ini difokuskan pada adanya peraturan tentang lingkungan hidup, filosofi dari manajer puncak, adanya

sugesti dari pelanggan, adanya sugesti dari lembaga lingkungan hidup seperti WALHI, adanya sugesti dari komunitas lingkungannya. Beberapa aspek lain dapat dikembangkan misalnya tentang aspek **Tanggung Jawab Lingkungan Hidup** dengan pengamatan pertanyaan pada apakah kebijakan mengenai produk/jasa yang ramah lingkungan adalah tujuan utama perusahaan, apakah terdapat kepemilikan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang cukup dikaitkan dengan tanggung jawab lingkungan hidup, bagaimana pula tentang kepemilikan usaha dalam mengatasi limbah perusahaan, kebijakan perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan mengalami kerugian, kebijakan perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan harus menutup usahanya. Pada aspek **Persepsi Manajemen terhadap Keterlibatan Perusahaan dalam Masalah Lingkungan Hidup** beberapa pertanyaan yang sering menjadi perhatian adalah terdapatnya unit yang mengurus lingkungan hidup dalam perusahaan, terdapat anggaran dana untuk perlindungan lingkungan hidup di sekitar perusahaan, terdapatnya program atau prosedur yang mengurangi konsumsi sumber daya alam agar hemat, terdapatnya studi keselamatan lingkungan hidup jika perusahaan Anda menggunakan mesin-mesin dalam kegiatan produksinya. Pada aspek **Audit Lingkungan** cakupan pengamatan misalnya perusahaan apakah sudah melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara teratur setiap tahun, apakah perusahaan melakukan audit atas kinerja perusahaan yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan keselamatan lingkungan hidup sekitar, apakah hasil audit kinerja lingkungan tersebut menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam aktivitas berikutnya. Sedangkan pada aspek **Pelaporan Akuntansi Lingkungan** pengamatan pertanyaan pada umumnya dapat seperti apakah dalam perusahaan terdapat proses pengurangan atau pembatasan limbah, apakah dalam perusahaan terdapat penelusuran terhadap biaya aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan, apakah dalam perusahaan terdapat proses desain produk yang dipengaruhi oleh pertimbangan aspek lingkungan, apakah perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi standar lingkungan hidup, apakah perusahaan selalu mengidentifikasi bahan baku yang membahayakan lingkungan, apakah perusahaan selalu

mengurangi atau membatasi bahan baku yang membahayakan lingkungan, apakah perusahaan sudah menyajikan biaya yang terkait dengan pengolahan limbah perusahaan dalam laporan keuangan

KESIMPULAN

Sebagai suatu program CSR tentunya memerlukan suatu evaluasi, jadi memerlukan suatu audit yang bersifat transparan dan menyeluruh atas semua perangkat yang relevan untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian kinerja yang telah benar-benar dilaksanakan. Audit lingkungan seyogyanya memuat *environmental awareness*, yaitu kondisi-kondisi yang menyebabkan responden perhatian terhadap masalah lingkungan hidup. Selain aspek tadi juga memuat *Enviromental Involvement* dan *Environmental Reporting*. Adapun laporan *Socio Economic Enviromental Accounting* yang baik tentu akan memuat *social performance measurement* seperti yang telah di uraikan pada paparan di atas. Pertanyaan pertanyaan yang menjadi pengamatan dalam audit lingkungan tersebut untuk memenuhi tujuannya yaitu menjaga lingkungan alam dan meningkatkan aspek sosial masyarakat, disamping aspek ekonomi yang pada umumnya menjadi sasaran utama, Hal ini sejalan dengan apa yang telah di atur dalam SFAC no 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya, dan perhatian ini juga telah disampaikan oleh Global Reporting Initiative (GRI, 2002), bahwa pelaporan *sustainable reporting* tidak bisa dipisahkan dengan *corporate social responsibility*, Lebih lanjut Dikemukakan bahwa *Sustainable Reporting* memiliki tiga elemen, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian pengantar memberikan informasi mengenai overview tentang *Sustainable Reporting* (SR).
2. Bagian pertama memberikan definisi, isi, kualitas, dan batasan laporan.
3. Bagian kedua memberikan petunjuk mengenai standar pengungkapan, dalam SR meliputi pengungkapan informasi yang relevan dan material mengenai organisasi yang menjadi perhatian berbagai stakeholder. Standar

pengungkapan yang ada meliputi strategi dan profil perusahaan, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan dan sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achda, B. Tamam, 2006, *Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility(CSR) dan Implementasinya di Indonesia*, Seminar Nasional, *a Promise of Gold Rating: Sustainable CSR*, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin M Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Belkaoui, A. R and Picur, R.D, 1991, *Voters' concerns are turning the political agenda green*, Congressional Quarterly (January 20):186-187.
- Cahyatri, Witri, 2008, *Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Pembentukan Citra PT Pertamina UP III Bandung*, Mimbar vol xxiv, no 2, 165 – 176.
- Crowther, David, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Guler Aras & Ventus Publishing ApS,
- Deegan, Craig, 2004, *Financial Accounting Theorym*, The McGraw Hill Companies Inc, Toronto.
- Friedman, Milton, 1962, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press
- Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kompas 25 Juni 2010, *Kepala Daerah Turut Terlibat Merambah*, hal. 27.
- Kompas Kompas 2 Juli 2010, *Becermin pada Sejarah Kelam*, hal. 17.
- Megawati, Meiana, 2012, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Perusahaan*, Makalah, 1 – 26.
- Peschke, Karl- Heinz, 2003, *Etika Kristiani: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, Jilid IV, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Priyono, Anjar, 2008, *Faktor Pendorong dan Penghambat Rantai Pasokan Ramah Lingkungan: Literatur Review*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 12, No. 1, 47-54.
- Purwanto, Andie Tri, 2000, *Perangkat Manajemen Lingkungan, Tools Manajemen Lingkungan*, 1–21.

Singgih, Moses L, 2011, *Pengukuran Dampak Lingkungan Menggunakan Environmental Management Accounting (EMA)*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

www.INFODOKTERKU.com.

Wiedmann, T. and Manfred. L., 2006, *Third Annual International Sustainable Conference Sustainability- Creating the Culture*, 15-16 November 2006,